

Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah (MA)**Yaa Bunayya Kota Jayapura**Nurlena Rumagutawan^{1*}, Marwan Sileuw², Hardianti³^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua**e-mail: nurlenaruamagutawan6@gmail.com***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah (MA) Yaa Bunayya Kota Jayapura serta mengidentifikasi kendala guru ketika kedua kurikulum dilaksanakan secara bersamaan pada jenjang kelas yang berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, serta dua guru mata pelajaran. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, sedangkan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 pada kelas XI dan XII dikelola melalui RPP berbasis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, sedangkan Kurikulum Merdeka pada kelas X menggunakan modul ajar berbasis Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran, praktik Kurikulum 2013 di madrasah cenderung lebih terstruktur dan diarahkan guru, sementara Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih luas bagi diferensiasi, asesmen diagnostik, dan pembelajaran berbasis proyek. Evaluasi dilakukan melalui supervisi akademik dan rapat berkala, dengan perbedaan utama pada penggunaan KKM dalam Kurikulum 2013 dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Kendala utama mencakup adaptasi kompetensi guru, beban administrasi ganda, keragaman kemampuan dan motivasi peserta didik, keterbatasan media digital, serta anggaran pelatihan. Temuan menegaskan pentingnya koordinasi manajerial, penguatan kompetensi guru, dan dukungan sumber daya selama masa transisi kurikulum.

Kata kunci: Implementasi Kurikulum; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka; Madrasah Aliyah; Manajemen Kurikulum

ABSTRACT

This study analyzes the management of Curriculum 2013 and the Merdeka Curriculum implementation at Madrasah Aliyah (MA) Yaa Bunayya in Jayapura City and identifies teachers' constraints when both curricula are implemented simultaneously across different grade levels. A descriptive qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving the head of the madrasah, the deputy head for curriculum affairs, and two subject teachers. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing or verification, while trustworthiness was strengthened through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that Curriculum 2013 in grades XI and XII is managed through lesson plans based on Core Competencies and Basic Competencies, whereas the Merdeka Curriculum in grade X uses teaching modules based on Learning Outcomes, Learning Objectives, and the Learning Objective Flow. In classroom practice, Curriculum 2013 at the studied madrasah tends to be more structured and teacher-directed, while the Merdeka Curriculum provides broader space for differentiated learning, diagnostic assessment, and project-based learning. Evaluation is conducted through academic supervision and periodic teacher meetings, with a key distinction between Minimum Mastery Criteria in Curriculum 2013 and learning objective achievement criteria in the Merdeka Curriculum. Major constraints include teacher adaptation, a dual administrative workload, differences in students' ability and motivation, limited digital learning media, and restricted training budgets. The findings emphasize the importance of managerial coordination, continuous teacher capacity development, and adequate resource support during curriculum transition.

Keywords: Curriculum 2013; Curriculum Implementation; Curriculum Management; Madrasah Aliyah; Merdeka Curriculum

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses terencana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik agar mampu berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial. Orientasi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional yang menempatkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya. Dalam konteks pendidikan Islam, pentingnya pengembangan pengetahuan juga dapat ditautkan dengan QS Al-‘Alaq [96]: 1–5. Shihab (2002) menjelaskan bahwa perintah membaca tidak terbatas pada teks tertulis, tetapi juga mencakup upaya memahami realitas secara berulang dan mendalam. Dengan demikian, kualitas pengelolaan pembelajaran menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perubahan lingkungan.

Salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum tidak hanya memuat struktur mata pelajaran, tetapi juga mengarahkan tujuan, pengalaman belajar, strategi pembelajaran, asesmen, dan tata kelola pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Nurdin (2002) menempatkan profesionalitas guru sebagai unsur penting dalam keberhasilan implementasi kurikulum, sedangkan Mulyasa (2013, 2017) menegaskan bahwa perubahan kurikulum menuntut kesiapan perangkat, perubahan praktik pembelajaran, dan dukungan manajemen sekolah. Karena itu, keberhasilan kurikulum tidak cukup dinilai dari kelengkapan dokumen kebijakan, melainkan dari kemampuan satuan pendidikan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam proses belajar yang konsisten dan bermakna.

Perubahan kurikulum di Indonesia berlangsung sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan kompetensi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pengembangan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta mendorong penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kajian Muhammad et al. (2022) menunjukkan bahwa pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 menempatkan aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan sebagai rangkaian penting pembelajaran. Dalam praktik, kualitas pelaksanaan tetap sangat ditentukan oleh kapasitas guru, ketersediaan sumber belajar, serta konsistensi supervisi dan evaluasi di tingkat satuan pendidikan.

Kurikulum Merdeka hadir dengan orientasi yang memberi ruang lebih luas bagi satuan pendidikan dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini mengembangkan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran, serta menekankan diferensiasi, asesmen sebagai bagian dari proses belajar, dan pembelajaran berbasis proyek. Vhalery et al. (2022) menilai gagasan merdeka belajar sebagai upaya memperluas fleksibilitas proses pendidikan, sedangkan Ningrum (2022) menekankan pentingnya pengembangan perangkat pembelajaran yang adaptif. Perubahan tersebut membuat fungsi manajemen kurikulum semakin penting karena sekolah dan madrasah harus mengelola penyesuaian perangkat, sumber daya, pembagian tugas, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi secara serempak.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa transisi menuju Kurikulum Merdeka tidak berlangsung tanpa hambatan. Zulaiha et al. (2022) mengidentifikasi problematika guru dalam memahami dan menerapkan prinsip Kurikulum Merdeka, sementara Monalisa dan Irfan (2023) menyoroti tantangan guru dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dan perangkat ajar. Apriatni dan Nindiasari (2023) menunjukkan bahwa kesiapan madrasah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan dukungan organisasi. Penelitian Martatiyana et al. (2023) juga memperlihatkan adanya perbedaan nyata antara implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dari sisi perencanaan, pembelajaran, dan asesmen. Temuan-temuan tersebut mengisyaratkan bahwa transisi kurikulum merupakan proses organisasional, bukan sekadar penggantian dokumen pembelajaran.

Dari perspektif manajemen pendidikan, perubahan kurikulum dapat dianalisis melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Rahmawati (2023) menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan kurikulum dengan kepemimpinan dan kapasitas organisasi sekolah, sedangkan Mulyasa (2017) menempatkan supervisi, pengembangan kompetensi guru, serta pengelolaan sumber daya sebagai faktor pendukung implementasi. Kerangka *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC) membantu memetakan bagaimana tujuan kurikulum dirumuskan menjadi program kerja, bagaimana sumber daya dibagi, bagaimana pembelajaran dilaksanakan, dan bagaimana hasil pelaksanaan dipantau untuk perbaikan berikutnya. Dalam masa transisi dua kurikulum, fungsi-fungsi tersebut menjadi lebih kompleks karena guru dan pengelola sekolah harus memastikan dua sistem berjalan dalam satu organisasi pada saat yang sama.

Tantangan tersebut semakin relevan pada satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2024) masih mencatat adanya kesenjangan kualitas dan dukungan pendidikan antarwilayah, termasuk kebutuhan peningkatan sarana, akses belajar, dan kapasitas tenaga pendidik. Dalam konteks Papua, kondisi geografis, variasi akses sumber belajar, dan

dukungan infrastruktur dapat memengaruhi kecepatan adaptasi kebijakan pendidikan. Walaupun kondisi tiap satuan pendidikan tidak dapat digeneralisasi, faktor sumber daya perlu ditempatkan sebagai konteks penting ketika menilai keberhasilan implementasi kurikulum di wilayah timur Indonesia.

MA Yaa Bunayya Kota Jayapura merupakan madrasah yang sedang berada dalam masa transisi kurikulum. Berdasarkan data lapangan, madrasah memiliki 17 guru dan 29 peserta didik. Pada tahun pelajaran yang diteliti, Kurikulum Merdeka telah diterapkan pada kelas X, sedangkan kelas XI dan XII masih menggunakan Kurikulum 2013. Seluruh guru mengajar pada kelas dengan struktur kurikulum yang berbeda sehingga tidak terdapat pemisahan tenaga pendidik secara khusus berdasarkan kurikulum. Situasi ini membuat seorang guru dapat menghadapi dua jenis perangkat, logika asesmen, dan tuntutan administrasi dalam satu periode pembelajaran.

Observasi awal menunjukkan beberapa persoalan yang perlu dikelola secara simultan. Guru masih melakukan penyesuaian terhadap penyusunan modul ajar dan pembelajaran berdiferensiasi, sementara perangkat Kurikulum 2013 tetap harus dipenuhi untuk kelas yang belum beralih. Pada sisi peserta didik, perbedaan kemampuan, motivasi, dan tingkat kemandirian belajar memengaruhi penerapan strategi pembelajaran. Pada sisi organisasi, ketersediaan media digital, fasilitas multimedia, anggaran pelatihan, dan pengaturan jadwal menjadi bagian dari tantangan pelaksanaan. Kondisi ini konsisten dengan kajian Asrofi (2025), Kauser et al. (2025), dan Syafriani et al. (2025) yang memperlihatkan bahwa kesiapan guru, sumber daya, dan dukungan organisasi menjadi isu berulang dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Kajian tentang perubahan kurikulum telah berkembang cukup luas. Anriani et al. (2025) membahas dinamika peralihan Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka, Saputra dan Setiawan (2024) menelaah implikasi perbedaan kedua kurikulum terhadap pembelajaran, sedangkan Fatmawati et al. (2025) mengaitkan implementasi Kurikulum Merdeka dengan proses dan hasil belajar. Namun, sebagian kajian lebih banyak memperlakukan kedua kurikulum sebagai dua sistem yang dibandingkan secara konseptual atau ditelaah pada sekolah yang telah berfokus pada satu kurikulum. Masih diperlukan kajian yang memperlihatkan bagaimana satu madrasah mengelola dua kurikulum secara bersamaan ketika guru yang sama harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan perangkat yang berbeda.

Celah tersebut menjadi penting karena implementasi kurikulum ganda pada masa transisi berpotensi melahirkan persoalan manajemen yang tidak sepenuhnya muncul pada satuan pendidikan yang telah beralih secara menyeluruh. Pengorganisasian tugas, pengaturan dokumen, penyesuaian jadwal, kebutuhan supervisi, pelatihan guru, pemanfaatan sarana, dan evaluasi pembelajaran harus dilakukan tanpa mengurangi layanan pendidikan kepada peserta didik. Mansur (2023) menyatakan bahwa perubahan kurikulum dapat menghadapi hambatan sistemik ketika kesiapan organisasi tidak berkembang sejalan dengan tuntutan kebijakan. Irkhamni et al. (2020) juga memperlihatkan bahwa inovasi pendidikan membutuhkan dukungan struktur sekolah agar gagasan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis manajemen implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di MA Yaa Bunayya Kota Jayapura dengan fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru dalam menjalankan kedua kurikulum secara bersamaan. Penelitian diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan transisi kurikulum pada madrasah, sekaligus menghasilkan implikasi manajerial yang dapat digunakan untuk memperkuat kesiapan guru, koordinasi organisasi, dan dukungan sumber daya selama proses perubahan kurikulum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *case study* atau studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami proses manajemen implementasi kurikulum secara mendalam berdasarkan pengalaman pelaku pendidikan dalam konteks organisasi yang nyata. Creswell (2014) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi suatu sistem yang dibatasi oleh tempat, aktivitas, dan konteks tertentu secara komprehensif. Sejalan dengan itu, Murdiyanto (2020) menyatakan bahwa penelitian kualitatif relevan untuk menelaah makna, proses, interaksi, dan dinamika sosial yang tidak memadai apabila hanya direduksi menjadi angka.

Lokasi penelitian adalah Madrasah Aliyah (MA) Yaa Bunayya Kota Jayapura yang beralamat di Jalan Yoka No. 19, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Lokasi dipilih secara bertujuan karena pada periode penelitian madrasah menjalankan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada tingkat kelas yang berbeda. Kondisi tersebut memungkinkan penelitian mengamati bagaimana satu organisasi pendidikan mengelola perangkat dan praktik pembelajaran dari dua kurikulum dalam waktu yang sama.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan dua guru mata pelajaran yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan kurikulum. Sugiyono (2016, 2017) menjelaskan bahwa pemilihan informan secara purposif dilakukan ketika peneliti membutuhkan sumber yang dianggap paling mengetahui fenomena yang dikaji. Data sekunder berasal dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, modul ajar, silabus, Surat Keputusan pembagian tugas guru, jadwal pembelajaran, serta dokumen madrasah lain yang relevan dengan implementasi kurikulum.

Komposisi informan dan fokus informasi yang dihimpun diringkas pada Tabel 1. Penyajian berdasarkan peran kelembagaan digunakan agar pembahasan berpusat pada fungsi informan dalam pengelolaan kurikulum dan tidak bergantung pada identitas personal.

Tabel 1. Informan Penelitian dan Fokus Data

Kode	Peran Informan	Jumlah	Fokus Informasi
KM	Kepala madrasah	1	Kebijakan, dukungan sumber daya, supervisi, dan evaluasi kelembagaan
WKM	Wakil kepala bidang kurikulum	1	Perencanaan kurikulum, pembagian tugas, jadwal, perangkat, dan koordinasi guru
G1–G2	Guru mata pelajaran	2	Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, asesmen, kendala, dan adaptasi dua kurikulum

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa informan dipilih untuk mewakili tingkat kebijakan, koordinasi kurikulum, dan praktik pembelajaran. Komposisi ini memungkinkan data dibandingkan antarperan sehingga informasi mengenai kebijakan madrasah dapat diuji konsistensinya dengan pengalaman guru di kelas.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman informan mengenai pembagian tugas, penyusunan perangkat, strategi pembelajaran, bentuk asesmen, dukungan madrasah, dan kendala implementasi. Dokumentasi dipakai untuk mengonfirmasi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, terutama terkait keberadaan RPP, modul ajar, silabus, jadwal, dan dokumen pembagian tugas. Penggunaan lebih dari satu teknik mengikuti prinsip penelitian kualitatif yang menempatkan triangulasi sebagai strategi untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena (Sugiyono, 2016).

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang merencanakan pengumpulan data, melakukan interaksi dengan informan, menafsirkan informasi, dan menarik makna dari data. Peneliti dibantu oleh pedoman wawancara, lembar observasi, catatan lapangan, serta alat perekam. Penggunaan instrumen bantu ditujukan untuk menjaga konsistensi fokus penelitian, sedangkan fleksibilitas wawancara tetap dipertahankan agar informasi yang muncul selama proses pengumpulan data dapat ditelusuri secara lebih mendalam.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi, data dipilih dan dikelompokkan ke dalam tema perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan kendala. Pada tahap penyajian, informasi disusun dalam uraian naratif dan tabel perbandingan agar hubungan antartema dapat dibaca secara sistematis. Pada tahap verifikasi, temuan dibandingkan antar-informan dan antar-teknik pengumpulan data untuk memastikan bahwa kesimpulan tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, dan guru. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan wawancara dengan hasil observasi dan dokumen. Triangulasi waktu digunakan untuk melihat konsistensi informasi yang muncul pada kesempatan pengumpulan data yang berbeda. Strategi tersebut dipilih untuk meningkatkan kredibilitas interpretasi dan mengurangi kemungkinan kesimpulan yang terlalu dipengaruhi oleh persepsi satu informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Pengorganisasian Kurikulum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran di MA Yaa Bunayya disusun mengikuti karakteristik perangkat masing-masing kurikulum. Pada kelas XI dan XII yang masih menggunakan Kurikulum 2013, guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Pada kelas X yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, guru menggunakan modul ajar

yang mengacu pada Capaian Pembelajaran, kemudian dijabarkan menjadi Tujuan Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran. Perbedaan perangkat tersebut menuntut guru memahami dua logika perencanaan secara bersamaan, terutama dalam menghubungkan tujuan pembelajaran, materi, strategi, dan asesmen.

Pada Kurikulum 2013, perencanaan cenderung disusun lebih terstruktur dan mengikuti format perangkat yang telah familiar bagi guru. Pada Kurikulum Merdeka, guru memperoleh ruang penyesuaian yang lebih luas terhadap kebutuhan peserta didik, tetapi fleksibilitas tersebut sekaligus menuntut kemampuan analisis yang lebih tinggi. Guru harus mengidentifikasi karakteristik kelas, menentukan kebutuhan belajar, memilih sumber belajar, dan menyesuaikan aktivitas agar capaian dapat diraih oleh peserta didik dengan kemampuan yang beragam. Temuan ini sejalan dengan Ningrum (2022) yang menekankan bahwa pengembangan perangkat dalam Kurikulum Merdeka memerlukan kemampuan adaptasi, serta Apriatni dan Nindiasari (2023) yang mengaitkan kesiapan implementasi dengan kesiapan sumber daya manusia di madrasah.

Pengorganisasian kurikulum dilakukan melalui pembagian tugas mengajar, penetapan wali kelas, penyusunan jadwal, dan pengaturan beban kerja guru. Karena guru yang sama dapat mengajar kelas dengan kurikulum berbeda, pengorganisasian tidak dilakukan dengan membentuk kelompok guru khusus Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Strategi yang dipakai adalah menyesuaikan perangkat dan metode sesuai kelas yang diajar. Pola ini memberi efisiensi dalam pemanfaatan tenaga pendidik, tetapi juga meningkatkan kebutuhan koordinasi karena guru harus mengelola dokumen dan ekspektasi pembelajaran yang berbeda.

Perbedaan utama pengorganisasian tampak pada fleksibilitas pengelolaan pengalaman belajar. Kurikulum 2013 di madrasah lebih sering dijalankan secara klasikal dengan struktur kegiatan yang seragam, sedangkan Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih besar untuk pengelompokan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar, aktivitas proyek, dan penyesuaian strategi. Namun, fleksibilitas tidak secara otomatis menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Guru memerlukan waktu, referensi, perangkat, dan dukungan kepala madrasah agar diferensiasi tidak berhenti pada variasi aktivitas, tetapi benar-benar terkait dengan tujuan dan kebutuhan peserta didik. Zulaiha et al. (2022) dan Monalisa dan Irfan (2023) sama-sama menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam menerjemahkan konsep Kurikulum Merdeka ke praktik merupakan tantangan penting pada masa awal implementasi.

Perbedaan manajerial antara kedua kurikulum pada lokasi penelitian dirangkum dalam Tabel 2. Ringkasan ini bukan dimaksudkan untuk menilai salah satu kurikulum lebih baik, tetapi untuk memperlihatkan kebutuhan pengelolaan yang berbeda ketika keduanya berjalan dalam satu madrasah.

Tabel 2. Perbandingan Manajemen Implementasi Kurikulum pada MA Yaa Bunayya

Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
Perencanaan	RPP berbasis KI dan KD; struktur perangkat relatif baku	Modul ajar berbasis CP, TP, dan ATP; lebih fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik
Pengorganisasian	Pembelajaran lebih banyak disusun secara klasikal dan seragam	Pengelompokan dan aktivitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar serta proyek
Pelaksanaan	Pendekatan saintifik; praktik di lokasi penelitian cenderung lebih diarahkan guru	Pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan aktivitas proyek yang lebih berpusat pada peserta didik
Evaluasi	Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan; mengacu pada KKM	Asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif; mengacu pada ketercapaian tujuan pembelajaran
Peran guru	Perencana, pengajar, pengelola kelas, dan penilai dalam struktur yang lebih terstandar	Fasilitator yang menyesuaikan tujuan, aktivitas, sumber, dan asesmen berdasarkan kebutuhan belajar

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa beban transisi terutama muncul pada titik perbedaan perangkat, pola pengelolaan kelas, dan asesmen. Guru tidak hanya mengganti format dokumen, tetapi juga menyesuaikan cara merencanakan pengalaman belajar dan cara membaca kemajuan peserta didik. Karena itu, fungsi perencanaan dan pengorganisasian dalam kerangka POAC perlu dilaksanakan secara terintegrasi agar perbedaan antar-kurikulum tidak berubah menjadi fragmentasi administrasi.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di MA Yaa Bunayya menggunakan pendekatan saintifik melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Buku ajar masih menjadi sumber belajar utama pada sejumlah mata pelajaran, sedangkan guru mengarahkan alur kegiatan sesuai tujuan yang telah disusun dalam RPP. Meskipun secara konseptual Kurikulum 2013 mendorong aktivitas peserta didik, temuan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran pada kelas yang menggunakan Kurikulum 2013 relatif lebih terstruktur dan lebih banyak diarahkan guru. Temuan ini perlu dipahami sebagai karakter praktik

pada lokasi penelitian, bukan sebagai karakter mutlak Kurikulum 2013. Kajian Muhammad et al. (2022) justru menegaskan bahwa pendekatan saintifik menuntut partisipasi aktif peserta didik melalui tahapan proses ilmiah.

Pada Kurikulum Merdeka, guru mulai menggunakan asesmen diagnostik untuk mengenali kondisi awal peserta didik, kemudian menyesuaikan aktivitas pembelajaran dengan perbedaan kemampuan. Pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata dan mendorong keterlibatan peserta didik. Pola ini sejalan dengan orientasi Kurikulum Merdeka yang memberi ruang bagi pembelajaran lebih fleksibel. Vhalery et al. (2022) dan Martatiyana et al. (2023) menjelaskan bahwa fleksibilitas kurikulum menuntut pergeseran peran guru dari penyampai materi menjadi perancang pengalaman belajar yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

Perbedaan pola pelaksanaan berimplikasi pada manajemen kelas. Dalam pembelajaran yang lebih terstruktur, guru dapat lebih mudah mengendalikan keseragaman alur kegiatan, tetapi peserta didik dengan kemampuan berbeda memerlukan dukungan tambahan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mempunyai peluang lebih besar untuk menyesuaikan proses, tetapi harus menyiapkan variasi strategi, bahan, dan bentuk dukungan. Pada madrasah dengan jumlah peserta didik yang relatif kecil, fleksibilitas pengelompokan sebenarnya memberi peluang untuk pendampingan lebih personal. Namun, manfaat tersebut baru dapat optimal jika guru mempunyai waktu perencanaan dan media pembelajaran yang memadai.

Temuan lapangan juga memperlihatkan adanya kesinambungan antara kedua kurikulum. Guru tetap menjalankan fungsi sebagai perencana, fasilitator, pengelola kelas, dan evaluator. Perubahan yang paling menonjol terletak pada derajat fleksibilitas serta cara mengaitkan asesmen dengan kebutuhan belajar. Dengan demikian, transisi tidak harus dipahami sebagai pemutusan total terhadap praktik sebelumnya. Pengalaman guru dari Kurikulum 2013 dapat menjadi modal untuk menjalankan Kurikulum Merdeka sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan asesmen formatif, dan penyusunan tujuan belajar yang lebih adaptif. Saputra dan Setiawan (2024) juga menunjukkan bahwa hubungan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka dapat dilihat sebagai proses kesinambungan sekaligus perubahan dalam orientasi pembelajaran.

Karakter pelaksanaan pembelajaran dirangkum pada Tabel 3 untuk memperlihatkan arah kegiatan, asesmen awal, strategi, proyek, peran peserta didik, dan implikasinya bagi guru.

Tabel 3. Karakter Pelaksanaan Pembelajaran pada Dua Kurikulum

Komponen	Praktik Kurikulum 2013	Praktik Kurikulum Merdeka	Implikasi bagi Guru
Arah kegiatan	Terstruktur mengikuti RPP dan tahapan saintifik	Fleksibel mengikuti CP, TP, ATP, dan kebutuhan kelas	Menguasai dua pola perencanaan
Asesmen awal	Bukan fokus utama dalam temuan	Diagnostik untuk memetakan kondisi awal	Mengaitkan hasil asesmen dengan strategi
Strategi	Klasikal dengan penyesuaian terbatas	Diferensiasi proses dan aktivitas mulai diterapkan	Menyiapkan variasi bahan dan dukungan
Proyek	Sesuai kebutuhan mata pelajaran	Lebih menonjol dan kontekstual	Koordinasi waktu dan sumber daya
Peran peserta didik	Aktif dalam tahapan saintifik; alur lebih diarahkan	Lebih mandiri dan terlibat dalam pilihan aktivitas	Pendampingan bertahap bagi yang belum mandiri

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Ringkasan pada Tabel 3 menegaskan bahwa adaptasi guru tidak hanya terkait terminologi perangkat. Perubahan yang lebih substantif berada pada proses pengambilan keputusan pembelajaran. Guru perlu membaca data awal peserta didik, memilih variasi strategi, menyiapkan sumber belajar, dan mengevaluasi efektivitas intervensi. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pengembangan kompetensi guru menjadi kebutuhan utama selama masa transisi.

3. Evaluasi dan Pengendalian Implementasi Kurikulum

Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan melalui supervisi akademik oleh kepala madrasah dan rapat evaluasi berkala antarguru. Supervisi berfungsi memantau kesesuaian perangkat dengan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan rapat guru digunakan untuk membahas kendala, penyesuaian jadwal, kebutuhan perangkat, dan perkembangan pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi *controlling* dalam pengelolaan kurikulum telah berjalan melalui mekanisme formal dan komunikasi internal. Ratno et al. (2026) menunjukkan bahwa supervisi akademik kepala madrasah dapat berkontribusi pada peningkatan profesionalisme guru apabila diikuti dengan tindak lanjut yang relevan terhadap kebutuhan pembelajaran.

Perbedaan evaluasi pembelajaran terlihat pada acuan penilaian. Kurikulum 2013 menggunakan Kriteria Ketuntasan Minimal serta penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka

menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif dengan penekanan pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari fokus pada ketuntasan berbasis batas nilai menuju penggunaan asesmen sebagai informasi untuk memperbaiki proses belajar. Meskipun demikian, perubahan paradigma asesmen menuntut guru memahami cara menetapkan kriteria ketercapaian, memberi umpan balik, dan menggunakan hasil asesmen untuk menentukan tindak lanjut.

Dalam perspektif manajemen, evaluasi tidak berhenti pada pencatatan hasil belajar. Data asesmen, hasil supervisi, dan pengalaman guru perlu dikembalikan ke tahap perencanaan. Siklus ini penting karena masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan, misalnya rendahnya kemandirian peserta didik atau keterbatasan media, harus menghasilkan keputusan baru terkait strategi, pengelompokan, sumber belajar, atau kebutuhan pelatihan. Rahmawati (2023) menekankan hubungan antara manajemen kurikulum dan kepemimpinan pendidikan, sedangkan Mulyasa (2017) menempatkan evaluasi dan supervisi sebagai mekanisme penting untuk menjaga mutu implementasi.

Temuan juga memperlihatkan bahwa keberhasilan evaluasi sangat bergantung pada kemampuan madrasah mengubah hasil pemantauan menjadi tindak lanjut. Apabila supervisi hanya berfungsi memeriksa kelengkapan administrasi, persoalan pedagogis berisiko tidak tertangani. Sebaliknya, supervisi yang mendiskusikan kesulitan guru dalam diferensiasi, asesmen, atau pengelolaan proyek dapat menjadi sarana pengembangan profesional yang kontekstual. Dengan demikian, fungsi pengendalian sebaiknya diposisikan sebagai proses pembelajaran organisasi, bukan hanya mekanisme pemeriksaan kepatuhan.

4. Kendala Guru dalam Menerapkan Dua Kurikulum

Kendala pertama berasal dari aspek guru. Guru harus menyesuaikan diri dengan konsep Kurikulum Merdeka sambil mempertahankan kelengkapan administrasi Kurikulum 2013 untuk kelas yang belum beralih. Kondisi ini menimbulkan beban administrasi ganda, khususnya dalam penyusunan RPP, modul ajar, perangkat asesmen, dan dokumentasi pembelajaran. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru memahami variasi kemampuan peserta didik dan menyusun aktivitas yang tidak seragam. Zulaiha et al. (2022) serta Monalisa dan Irfan (2023) menemukan persoalan serupa, yaitu keterbatasan pemahaman, kesiapan, dan pengalaman guru ketika harus menerapkan perangkat serta strategi baru.

Kendala kedua berada pada aspek peserta didik. Perbedaan kemampuan akademik, motivasi belajar, dan kemandirian membuat respon peserta didik terhadap pembelajaran tidak seragam. Sebagian peserta didik masih lebih nyaman ketika alur kegiatan diarahkan secara rinci oleh guru, sedangkan Kurikulum Merdeka menuntut keterlibatan dan kemandirian yang lebih besar. Situasi ini membuat transisi memerlukan pendampingan bertahap. Guru tidak dapat serta-merta menyerahkan kontrol belajar kepada peserta didik, tetapi perlu membangun kebiasaan menetapkan target, bekerja dalam kelompok, menyelesaikan proyek, dan merefleksikan hasil belajar.

Kendala ketiga berkaitan dengan sarana dan prasarana. Keterbatasan media pembelajaran digital, ruang multimedia, serta alat dan bahan pembelajaran membatasi variasi aktivitas yang dapat dilaksanakan. Kurikulum Merdeka tidak selalu identik dengan penggunaan teknologi, tetapi fleksibilitas sumber belajar dan proyek sering membutuhkan akses terhadap media yang lebih beragam. Kause et al. (2025) menunjukkan bahwa sarana menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas implementasi, sedangkan Syafriani et al. (2025) menekankan bahwa kesiapan sekolah perlu dilihat bersama dengan kapasitas guru dan dukungan lingkungan belajar.

Kendala keempat berasal dari aspek kebijakan dan sumber daya organisasi. Madrasah telah memberi ruang bagi guru untuk berinovasi dan memanfaatkan platform pembelajaran mandiri, tetapi anggaran pelatihan belum memungkinkan pengembangan kompetensi dilakukan secara intensif. Pada saat yang sama, penggabungan dua kurikulum dalam satu tahun ajaran memerlukan penyesuaian jadwal dan koordinasi administrasi. Mansur (2023) menjelaskan bahwa hambatan sistemik dapat muncul ketika kebijakan perubahan tidak diikuti dengan kapasitas organisasi yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan kepala madrasah perlu diterjemahkan menjadi prioritas program yang terukur, terutama pada pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sarana.

Keempat kelompok kendala tersebut saling berhubungan. Keterbatasan media dapat meningkatkan beban guru karena guru harus mencari alternatif bahan ajar; keterbatasan pelatihan dapat memperlambat kemampuan guru dalam menerapkan diferensiasi; sedangkan rendahnya kemandirian peserta didik dapat membuat guru kembali menggunakan pola pembelajaran yang sangat diarahkan. Oleh sebab itu, penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui satu intervensi. Madrasah memerlukan strategi yang menghubungkan pengembangan guru, pengadaan sarana, penguatan supervisi, dan penataan administrasi sebagai satu paket manajemen perubahan.

Rangkuman kendala dan konsekuensi manajerial disajikan pada Tabel 4. Penyajian ini membantu melihat hubungan antara sumber masalah dan area pengelolaan yang perlu diprioritaskan oleh madrasah.

Tabel 4. Kendala Implementasi Dua Kurikulum dan Konsekuensi Manajerial

Aspek	Kendala Utama	Konsekuensi terhadap Implementasi	Kebutuhan Pengelolaan
Guru	Adaptasi Kurikulum Merdeka, penyusunan modul, diferensiasi, administrasi ganda	Waktu perencanaan meningkat dan kualitas penerapan dapat tidak merata	Pelatihan berbasis kebutuhan, berbagi praktik, simplifikasi administrasi internal
Peserta didik	Perbedaan kemampuan, motivasi, dan kemandirian	Kecepatan adaptasi dan keterlibatan belajar tidak sama	Pendampingan bertahap, pengelompokan fleksibel, penguatan motivasi
Sarana prasarana	Media digital, ruang multimedia, serta alat belajar terbatas	Pilihan aktivitas dan sumber belajar menjadi lebih sempit	Prioritas pengadaan sesuai kebutuhan pembelajaran dan pemanfaatan sumber alternatif
Kebijakan madrasah	Anggaran pelatihan terbatas dan penyesuaian jadwal dua kurikulum	Koordinasi serta pengembangan kompetensi tidak selalu dapat dilakukan intensif	Perencanaan anggaran, jadwal pendampingan, supervisi, dan koordinasi kurikulum

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa hambatan yang tampak di kelas memiliki akar pada keputusan manajerial yang lebih luas. Penguatan implementasi karena itu perlu diletakkan dalam kerangka perbaikan organisasi, bukan semata-mata menuntut guru menambah kreativitas. Kepala madrasah dan tim kurikulum mempunyai peran untuk mengurangi beban yang dapat disederhanakan dan memfokuskan dukungan pada aspek yang benar-benar memengaruhi kualitas pembelajaran.

5. Implikasi Manajerial dalam Masa Transisi Kurikulum

Jika temuan dibaca melalui kerangka POAC, aspek perencanaan perlu diperkuat melalui pemetaan kebutuhan guru, peserta didik, perangkat, dan sarana pada setiap tingkat kelas. Perencanaan yang sama untuk seluruh guru kurang memadai karena tingkat penguasaan perangkat Kurikulum Merdeka dapat berbeda. Madrasah dapat menggunakan hasil supervisi dan rapat evaluasi untuk menentukan topik pendampingan yang paling mendesak, misalnya penyusunan modul ajar, asesmen diagnostik, atau pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan tersebut membuat pelatihan lebih relevan dibandingkan kegiatan yang bersifat umum dan tidak langsung menjawab persoalan kelas.

Pada fungsi pengorganisasian, pembagian tugas perlu mempertimbangkan beban administratif yang muncul dari dua kurikulum. Walaupun jumlah guru terbatas, koordinasi dapat diperkuat melalui kelompok kerja internal berdasarkan mata pelajaran atau kebutuhan perangkat. Guru yang lebih cepat beradaptasi dapat berbagi contoh perangkat dan strategi dengan guru lain. Pola kolaborasi tersebut tidak memerlukan struktur baru yang rumit, tetapi memerlukan jadwal dan tanggung jawab yang jelas. Anriani et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan kurikulum merupakan proses dinamis sehingga mekanisme belajar antar-guru menjadi penting untuk menjaga konsistensi implementasi.

Pada fungsi pelaksanaan, prioritas utama adalah memastikan bahwa fleksibilitas tidak menurunkan kejelasan tujuan belajar. Diferensiasi sebaiknya dimulai dari kebutuhan yang dapat diamati dan dikelola, misalnya variasi tingkat bantuan, pilihan aktivitas, atau tingkat kompleksitas tugas. Guru juga perlu memanfaatkan karakter kelas yang relatif kecil untuk memberikan umpan balik lebih individual. Fatmawati et al. (2025) mengaitkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka dengan pengalaman belajar peserta didik, sehingga inovasi sebaiknya dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap ketercapaian belajar, bukan sekadar variasi metode.

Pada fungsi pengendalian, supervisi akademik dapat dikembangkan menjadi mekanisme pendampingan. Hasil supervisi perlu menghasilkan *follow-up* yang jelas, misalnya perbaikan perangkat, diskusi strategi, observasi ulang, atau berbagi praktik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Ratno et al. (2026) mengenai pentingnya supervisi akademik dalam penguatan profesionalisme guru. Dengan demikian, evaluasi kurikulum bukan hanya menilai apakah perangkat tersedia, tetapi apakah perangkat tersebut berfungsi dalam pembelajaran dan membantu guru menyelesaikan masalah yang nyata.

Madrasah juga perlu mengelola transisi sebagai perubahan bertahap. Pengalaman Kurikulum 2013 tidak perlu diposisikan sebagai praktik yang harus ditinggalkan seluruhnya. Unsur yang masih relevan, seperti disiplin perencanaan, kejelasan tujuan, dan tahapan kegiatan, dapat dipadukan dengan fleksibilitas Kurikulum Merdeka. Kekuatan transisi justru terletak pada kemampuan organisasi memilih praktik yang efektif, mengurangi beban yang tidak diperlukan, dan membangun kebiasaan baru secara realistis. Asrofi (2025)

memperlihatkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah membutuhkan penyesuaian terhadap karakter lembaga, sedangkan Kause et al. (2025) menekankan pentingnya melihat tantangan dan peluang secara bersamaan.

Prioritas tindak lanjut yang dapat diturunkan dari temuan penelitian dirangkum dalam Tabel 5. Rekomendasi ini bersifat kontekstual untuk MA Yaa Bunayya dan tidak dimaksudkan sebagai model yang langsung digeneralisasi ke seluruh madrasah.

Tabel 5. Prioritas Tindak Lanjut Manajemen Transisi Kurikulum

Prioritas	Tindakan yang Dapat Dilakukan	Indikator Pemantauan
Penguatan kompetensi guru	Pendampingan internal terjadwal tentang modul ajar, asesmen, diferensiasi, dan proyek	Kualitas perangkat meningkat dan guru mampu menjelaskan alasan pemilihan strategi
Penataan administrasi	Menyepakati format kerja internal yang ringkas dan menghindari duplikasi dokumen yang tidak diperlukan	Waktu penyusunan administrasi berkurang tanpa menghilangkan dokumen wajib
Penguatan supervisi	Menghubungkan hasil supervisi dengan diskusi perbaikan dan observasi tindak lanjut	Setiap temuan supervisi memiliki rencana tindak lanjut yang terdokumentasi
Pemenuhan sarana prioritas	Memetakan media dan fasilitas berdasarkan kebutuhan pembelajaran paling mendesak	Sarana yang tersedia digunakan secara nyata dalam pembelajaran
Dukungan peserta didik	Menggunakan asesmen awal, pendampingan bertahap, dan strategi motivasi	Partisipasi, kemandirian, dan penyelesaian tugas peserta didik meningkat secara bertahap

Sumber: Data penelitian diolah, 2026.

Tabel 5 menempatkan pengembangan guru dan supervisi sebagai prioritas yang dapat segera dikerjakan, sambil memperbaiki sarana dan administrasi secara bertahap. Strategi tersebut relevan dengan kondisi madrasah yang masih membangun kapasitas organisasi. Fokus utama bukan memperbanyak program, melainkan memastikan setiap program menjawab hambatan yang telah teridentifikasi melalui data.

Secara teoritis, temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses manajemen yang saling terkait. Perencanaan yang baik akan kehilangan efektivitas apabila pengorganisasian sumber daya lemah, pelaksanaan tidak didampingi, atau evaluasi tidak menghasilkan tindak lanjut. Sebaliknya, dukungan kepala madrasah dapat menghasilkan perubahan yang lebih konsisten ketika dikombinasikan dengan ruang kolaborasi guru dan prioritas sumber daya yang jelas. Hal tersebut selaras dengan Mulyasa (2013, 2017) dan Rahmawati (2023) yang menempatkan kepemimpinan, kompetensi guru, serta pengelolaan sumber daya sebagai unsur penting dalam pelaksanaan kurikulum.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa masa transisi dua kurikulum menciptakan bentuk beban yang khas. Pada sekolah yang telah menggunakan satu kurikulum secara penuh, fokus adaptasi lebih banyak terletak pada penguasaan sistem baru. Pada MA Yaa Bunayya, guru masih perlu menjaga kualitas implementasi sistem lama sambil mempelajari sistem baru. Kondisi ini menjelaskan mengapa dukungan organisasi perlu mempertimbangkan beban simultan. Temuan tersebut melengkapi kajian Martatiyana et al. (2023) dan Saputra dan Setiawan (2024) yang membandingkan kedua kurikulum dengan menambahkan gambaran empiris mengenai pengelolaan keduanya dalam satu satuan pendidikan.

Dari sisi kontribusi praktis, penelitian menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan transisi sebaiknya tidak hanya dilihat dari tersusunnya modul ajar atau terpenuhinya jadwal. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan guru menggunakan perangkat untuk menyesuaikan pembelajaran, kualitas tindak lanjut supervisi, keterlibatan peserta didik, dan efisiensi beban administrasi. Dengan indikator tersebut, madrasah dapat mengarahkan sumber daya pada perubahan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas proses belajar.

Penelitian memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu madrasah dengan jumlah informan terbatas dan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik ke seluruh madrasah di Papua atau Indonesia. Selain itu, penelitian berfokus pada proses manajemen implementasi dan belum mengukur perubahan hasil belajar peserta didik secara kuantitatif. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan desain multi-situs, menambahkan perspektif peserta didik dan orang tua, serta mengombinasikan data kualitatif dengan capaian belajar atau indikator keterlibatan peserta didik.

SIMPULAN

Manajemen implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di MA Yaa Bunayya Kota Jayapura telah berjalan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan karakter yang menyesuaikan masing-masing kurikulum. Kurikulum 2013 pada kelas XI dan XII direncanakan melalui RPP

berbasis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, sedangkan Kurikulum Merdeka pada kelas X menggunakan modul ajar berbasis Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas guru, penataan jadwal, dan penyesuaian perangkat karena guru yang sama dapat mengajar kelas dengan kurikulum berbeda. Pada pelaksanaan, praktik Kurikulum 2013 di lokasi penelitian cenderung lebih terstruktur, sedangkan Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih besar bagi asesmen diagnostik, diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan keterlibatan peserta didik.

Evaluasi implementasi dilakukan melalui supervisi akademik dan rapat berkala. Perbedaan evaluasi pembelajaran terutama terlihat pada penggunaan KKM dalam Kurikulum 2013 dan orientasi pada ketercapaian tujuan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka. Kendala yang dihadapi guru mencakup proses adaptasi terhadap perangkat dan pendekatan baru, beban administrasi ganda, perbedaan kemampuan serta motivasi peserta didik, keterbatasan media pembelajaran digital, dan keterbatasan anggaran pelatihan. Kendala tersebut saling terkait sehingga penyelesaiannya membutuhkan pendekatan organisasi yang menghubungkan pengembangan kompetensi guru, penataan administrasi, pemenuhan sarana, dukungan peserta didik, serta penguatan supervisi.

Berdasarkan temuan, MA Yaa Bunayya perlu memprioritaskan pendampingan guru berbasis kebutuhan, membangun mekanisme berbagi praktik, menyederhanakan administrasi internal yang berpotensi duplikatif tanpa mengabaikan dokumen wajib, serta memastikan hasil supervisi menghasilkan tindak lanjut. Pengadaan sarana sebaiknya ditentukan berdasarkan urgensi pembelajaran, sedangkan peserta didik perlu didampingi secara bertahap untuk membangun kemandirian belajar. Secara akademik, penelitian memperlihatkan bahwa transisi dua kurikulum dalam satu madrasah merupakan persoalan manajemen perubahan yang menuntut koordinasi dan pembelajaran organisasi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anriani, T., Ningsih, N. S., Sari, P. S., Cahyaningsih, E., & Santosa, S. (2025). Perubahan kurikulum di Indonesia: Dinamika implementasi Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(2).
- Apriatni, S., & Nindiasari, H. (2023). Analisis kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka: Studi di MAN 2 Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 6(1).
- Asrofi, M. (2025). *Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Aliyah Takhassus Al Sya'iriyah Limpung Kabupaten Batang* [Tesis, Universitas PGRI Semarang].
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fatmawati, F., Iqbal, M., & Asra, M. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dan dampaknya terhadap prestasi belajar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 14–15.
- Irkhamni, I., Naufal, H., & Yuliani, M. (2020). Penelitian penerapan program sistem kredit semester menunjang terealisasinya merdeka belajar di SMA Negeri 1 Pekalongan. *Jurnal Konferensi Ilmiah Pendidikan*, 1(1).
- Kause, D. H. B., Nubatonis, B. E., Faot, F., & Santos, J. D. (2025). Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar: Tantangan dan peluang dalam implementasi di sekolah menengah pertama. *Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru*, 2(1).
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Laporan kesenjangan kualitas pendidikan wilayah barat dan timur*. Kemendikbudristek.
- Mansur, A. (2023). Dinamika pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan hambatan sistemik implementasinya. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1).
- Martatiyana, D. R., Derlis, A., Aviarizki, H. W., Jurdil, R. R., Andayani, T., & Hidayat, O. S. (2023). Analisis komparasi implementasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 9(1), 96–109. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v9i1.11600>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. R. Rohidi, Trans.). UI Press.
- Monalisa, M., & Irfan, A. (2023). Tantangan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(5).

- Muhammad, R. R., Lawson, D., Aslam, F., & Crawford, M. (2022). The scientific approach of the Indonesian 2013 curriculum: A comparison with other active learning strategies in mathematics. *Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education*, 5(2), 155–171. <https://doi.org/10.31756/jrsmte.523>
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan implementasi Kurikulum 2013*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2017). *Implementasi Kurikulum 2013: Panduan praktis bagi guru*. Remaja Rosdakarya.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Ningrum, A. S. (2022). Pengembangan perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka Belajar metode belajar. *Prosiding Pendidikan Dasar*, 1.
- Nurdin, S. (2002). *Guru profesional dan implementasi kurikulum*. Ciputat Pers.
- Rahmawati, S. (2023). *Manajemen komparatif kurikulum dan kepemimpinan pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ratno, S., Fatchurahman, F., & Kartini, N. H. (2026). Analisis hasil supervisi akademik kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru MTs Negeri 2 Kotawaringin Barat. *Anterior Jurnal*, 25(1).
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Saputra, A. A., & Setiawan, A. (2024). Kajian review Kurikulum K13 dan Kurikulum Merdeka dalam implikasinya terhadap pembelajaran di masa mendatang. Universitas Negeri Surabaya.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, Juz 'Ammah*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafriani, D., Dawolo, B. D. P., Butar Butar, L. A., Batubara, N., & Silitonga, S. (2025). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan Indonesia: Kajian literatur. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2).
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Research and Development Journal of Education*, 8(1).
- Zulaiha, S., Meldina, T., & Meisin. (2022). Problematika guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. *TERAMPIL: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*.